

## PENYUSUNAN PERENCANAAN PESISIR BERBASIS ISU WILAYAH DI DESA LEMBAR LOMBOK BARAT

Sukuryadi<sup>1,2)</sup>, Harry Irawan Johari<sup>1,2)</sup>, Ibrahim<sup>1,2)</sup>, Joni Safaat Adiansyah<sup>1,3)</sup>, Nurhayati<sup>1,4)</sup>, Nurin Rochayati<sup>2)</sup>, Mas'ad<sup>2)</sup>, Agus Herianto<sup>2)</sup>, Khosiah<sup>2)</sup>, Deviana Mayasari<sup>5)</sup>, Ahmad Kutbi Rais<sup>1)</sup>, Fathul Rakhman<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Pendidikan Geografi, FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>3)</sup>Program Studi Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

<sup>4)</sup>Program Studi Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Mataram, NTB, Indonesia

<sup>5)</sup>Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Corresponding author : Sukuryadi  
E-mail : abdillahsukuryadi@gmail.com

Diterima 29 Juni 2022, Direvisi 07 Juli 2022, Disetujui 08 Juli 2022

### ABSTRAK

Penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa pada lokasi kegiatan merupakan upaya mengarahkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan : (1) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya; (2) keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan (3) kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen rencana pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa. Pendekatan yang digunakan secara partisipatif dengan pelibatan masyarakat pesisir secara lebih luas dengan harapan dapat menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan alokasi ruang berbasis desa yang diintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan ini menghasilkan: 1) peta infrastruktur *social public* lainnya; 2) Peta *Land Use*; 3) Peta *sea use*; serta 4) rencana induk pengelolaan di wilayah pesisir Desa Lembar yang berisi tentang isu dan strategi pengembangan wilayah pesisir dan laut. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman aksi pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara terintegrasi dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kelestarian lingkungan dan ekonomi masyarakat local

**Kata kunci:** isu wilayah; perencanaan; pemberdayaan masyarakat; wilayah pesisir.

### ABSTRACT

The preparation of a village-based coastal area management plan at the activity location is an effort to direct the use of coastal resources and small islands in an integrated and sustainable manner by considering: (1) harmony, alignment, and balance with the carrying capacity of the ecosystem, utilization and protection functions, dimensions space and time, technological and socio-cultural dimensions; (2) the integrated use of various types of resources, functions, environmental aesthetics, and quality of coastal land; and (3) the obligation to allocate space and community access in the use of coastal areas and small islands that have social and economic functions. This activity aims to produce a village-based coastal area management plan document. The approach used is participatory with the broader involvement of coastal communities in the hope of determining the direction of resource use for each planning unit accompanied by the determination of village-based spatial allocations that are integrated with regional development plans. This activity resulted in 1) maps of other public social infrastructures; 2) Land Use maps; 3) Map of sea use, and 4) a management master plan in the coastal area of Lembar Village which contains issues and strategies for developing coastal and marine areas. The results obtained are expected to be used as guidelines for integrated and sustainable coastal and marine area management actions that can improve the environmental and economic sustainability of local communities

**Keywords:** coastal area; community empowerment; planning; regional issues.

## PENDAHULUAN

Wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil adalah wilayah yang berpotensi untuk dijadikan andalan sebagai modal utama dalam membangun suatu daerah (DKP Lobar, 2016; Sukuryadi *et al.*, 2021). Walaupun mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil harus dikelola secara benar agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan. Selama ini, sebagian besar potensi tersebut masih belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal, sehingga masih belum bisa meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir secara maksimal.

Untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil, Pemerintah telah menerbitkan suatu payung hukum yang mengatur tata cara pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil *jo* UU No. 1 Tahun 2014 dimana secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian. Perencanaan dilakukan melalui pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu (*integrated coastal management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya (Sukuryadi *et al.*, 2020; Sukuryadi *et al.*, 2021).

Dalam pengelolaan sumberdaya pesisir hendaknya dilakukan secara terpadu dan menyertakan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang berada dikawasan pesisir (Harahab, 2010; Sukuryadi *et al.*, 2021). Sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, prasarana dan sarana desa kawasan pesisir merupakan obyek dari pemberdayaan sebagai bagian dari upaya pengelolaan (Pattimahu *et al.*, 2010; Santoso, 2012).

Keberhasilan pengelolaan sumberdaya pesisir tidak terlepas dari upaya *empowering* masyarakat nelayan yang relatif masih miskin (Sawairnathan and Halimoon, 2017; Wardhani *et al.*, 2016). Pendekatan praktis dalam upaya pengelolaan lingkungan kawasan pesisir perlu menitik sentralkan pada unsur masyarakat yaitu melalui pendekatan eko-efisien yang memadukan konsep ekonomi dan ekologi melalui pemberdayaan masyarakat, dan hal ini akan mempunyai arti besar dalam upaya perlindungan ekosistem kawasan pesisir (Tuwo, 2011; Burhanuddin, 2011).

Bertambahnya penduduk yang berdomisili di kawasan pesisir menyebabkan meningkatnya eksplorasi terhadap sumberdaya pesisir, selain juga *over-fishing*

yang terjadi karena pemanfaatan secara berlebih terhadap sumberdaya perikanan tanpa memperhatikan jumlah yang tersedia, sehingga sumberdaya perikanan menjadi berkurang dan mengganggu keseimbangan ekologis kawasan pesisir.

Permasalahan wilayah pesisir Desa Lembar meliputi isu pencemaran, kerusakan lingkungan, dan sosial ekonomi. Isu ini memerlukan upaya pengelolaan secara terpadu apabila hal ini tidak dilakukan maka akan berakibat pada meningkatnya degradasi lingkungan yang pada akhirnya akan menurunkan produktifitas pengelolaan wilayah pesisir Desa Lembar sebagai penyokong bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Penyusunan Rencana Pengelolaan wilayah pesisir Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat merupakan upaya mengarahkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan: (1) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya; (2) keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan (3) kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi (Schaduw, 2015; Hakim *et al.*, 2017; Santoso, 2018; Sukuryadi *et al.*, 2019). Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk menyusun matrik perencanaan wilayah pesisir desa Lembar berbasis isu wilayah dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman aksi pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara terintegrasi dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kelestarian lingkungan dan ekonomi masyarakat local.

## METODE

### Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di desa Lembar yang merupakan salah satu kawasan yang berada di wilayah Teluk Lembar yang secara administrasi berada kecamatan Lembar kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat dan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei – 11 Juni 2022.

### Tahapan Kegiatan

Adapun kerangka kerja konsep (*conceptual framework*) proses perencanaan dan pelaksanaan berbasis-masyarakat di Kabupaten Lombok Barat secara ringkas meliputi Identifikasi Isue, Persiapan

Perencanaan, Persetujuan Rencana dan Pendanaan serta Pelaksanaan dan Penyesuaian. Pekerjaan penyusunan konsep perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa ini terdiri :

#### a. Tahap Pendahuluan

Tahap Pendahuluan meliputi empat kegiatan pokok yang berisikan kegiatan - kegiatan yaitu penentuan batas - batas wilayah perencanaan, mengidentifikasi karakteristik masing – masing desa, kajian terhadap kebijakan dan peraturan perundang - undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa. Secara lebih terinci kegiatan-kegiatan pada tahap ini yaitu:

1. Penentuan batas-batas wilayah perencanaan  
Penentuan batas-batas wilayah perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa dilakukan pada tanggal 27 Mei 2022. Analisis ruang lingkup wilayah perencanaan ini melalui pendekatan administratif desa.
2. Identifikasi karakteristik perwilayahan kawasan  
Pengkajian awal terhadap karakteristik wilayah perencanaan untuk memperoleh gambaran umum kondisi wilayah desa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2022. Kajian untuk mengidentifikasi karakteristik perwilayahan desa ini memanfaatkan data sekunder dalam rangka mengenali kondisi umum wilayah desa, seperti letak geografis dan administratif, kondisi fisik dasar, aksesibilitas, sosial budaya.
3. Evaluasi keterkaitan perencanaan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  
Mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa sebagai landasan hukum dalam perencanaan ini Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri terkait dan peraturan daerah.

#### b. Tahap Pemetaan dan Analisis

Pada tahap ini terdapat 3 (tiga) komponen kegiatan pokok yaitu pemetaan aspek pembangunan wilayah pesisir, analisis aspek perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa, dan analisis potensi dan permasalahan

1. Pemetaan aspek pembangunan wilayah pesisir berbasis desa

Pemetaan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi, terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dan informasi adalah dalam rangka menemukenali kondisi eksisting di desa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 . Setelah data terkumpul, dilakukan verifikasi data dari sumber-sumber data dan/atau pemangku kepentingan terkait dan selanjutnya dilakukan validasi untuk proses data selanjutnya.

2. Analisis aspek-aspek perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa  
Analisis data pada garis besarnya terdiri dari analisis data spasial dan non-spasial yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2022. Analisis data aspek-aspek perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa merupakan tahapan dalam rangka proses data menjadi informasi, mengetahui gambaran kondisi eksisting secara holistik serta kecenderungan perkembangan wilayah pesisir dan sekitarnya. Analisis juga ditujukan untuk mengetahui kesesuaian dan kebutuhan pengembangan aspek-aspek pembangunan wilayah pesisir berbasis desa.
3. Analisis potensi dan permasalahan  
Analisis untuk mengidentifikasi dan merumuskan potensi desa yang merupakan aspek-aspek yang dapat mendukung pengembangan wilayah pesisir berbasis desa dan permasalahan yang merupakan aspek-aspek yang dapat menghambat pengembangan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa dilakukan pada tanggal 4 Juni 2022.

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa berupa data sekunder dan data primer :

- a. Metode Pengumpulan Data Sekunder  
Data sekunder yang dikumpulkan dapat dalam bentuk laporan/buku, hasil penelitian, dan lain-lain yang terdapat di instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Desa. Metode pengumpulan data sekunder meliputi:
  - Survei instansional, yaitu pengumpulan data sekunder dengan cara mengunjungi langsung instansi/lembaga sumber data;
  - *Content analysis* (analisis muatan dokumen), yaitu pengumpulan data/informasi sekunder melalui kajian terhadap muatan dokumen-dokumen yang ada;

- b. Metode Pengumpulan Data Primer  
Pengumpulan data primer diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan data yang belum tersedia sebagai data sekunder, melengkapi data sekunder dan membangkitkan data baru. Pengumpulan data primer juga ditujukan untuk verifikasi data sekunder dan *ground check* untuk validasi data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa metode yaitu observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan pada tanggal 10 – 11 Juni 2022.

Metode dalam pengumpulan data primer terdiri dari :

1. Observasi/pengamatan dan pemetaan lapangan  
Observasi dan pemetaan lapangan menggunakan pendekatan *Rapid Rural Appraisal* (RRA). RRA merupakan seperangkat teknik atau prosedur untuk kajian cepat tentang kondisi atau rona suatu wilayah dimana didalamnya memasukkan aspek pengumpulan data secara partisipatif (*Participatory Rapid Assessment*). Beberapa teknik dari metode RRA diintegrasikan dalam pengumpulan data primer yaitu :
  - ✓ Observasi/pengamatan langsung di lapangan: pencatatan terhadap suatu kejadian, proses-proses, kondisi dan berbagai hubungan yang terjadi di lapangan;
  - ✓ Dokumentasi foto;
  - ✓ Pemetaan spasial terhadap obyek di lapangan dengan bantuan GPS (*Global Position System*) dan peta panduan survey;
  - ✓ Lintasan sejarah untuk mengumpulkan informasi mengenai sejarah pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa yang telah ada;
2. *Focus Group Discussion* (FGD)  
FGD dilaksanakan tanggal 11 Juni 2022 dengan tujuan untuk menggali secara komprehensif tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa, termasuk potensi, permasalahan, peluang bagi pengelolaan wilayah pesisir, penilaian terhadap lingkungan sosial-budaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan ekonomi di wilayah pesisir masih dihadapkan pada persoalan pokok bahwa sebagian besar masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Barat masih terilit kemiskinan. Sehingga kondisi ini turut berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakan

yang bersifat pemenuhan ekonomi jangka pendek dan menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan laut. Berdasarkan aspek kajian, ada beberapa isu wilayah yang muncul di Desa Lembar Lombok Barat antara lain :

### 1. Degradasi Ekosistem mangrove akibat konversi lahan menjadi tambak dan pemukiman

Ada sejumlah isu kritis dalam pembangunan desa pesisir diantaranya kerusakan ekologis baik bersifat alamiah maupun antropogenik, konflik penggunaan lahan dan lain sebagainya. Berbagai konflik juga sering terjadi antara pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan potensi ruang kawasan pesisir di Kabupaten Lombok Barat seperti konflik pemanfaatan ruang kawasan pariwisata dengan pemukiman masyarakat di Kecamatan Lembar. Selain itu konflik juga terjadi akibat adanya konversi lahan menjadi tambak, serta adanya penyimpangan pemanfaatan ruang pesisir yang tidak sesuai dengan alokasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

### 2. Abrasi Pantai dan Sungai

Dampak adanya pemanasan global disamping menyebabkan perubahan iklim juga menyebabkan kenaikan muka laut. Dampak turunan yang dapat diakibatkan oleh pemanasan global ini seperti abrasi, sedimentasi, angin puting beliung, banjir ROB, intrusi air laut dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi dampak yang dapat diakibatkan, maka diperlukan berbagai upaya-upaya baik secara struktur (alami dan buatan) maupun non struktur dengan melibatkan berbagai stakeholder. Tingginya aktivitas masyarakat di sekitar muara dan daerah aliran sungai merupakan salah satu yang menyebabkan terjadi abrasi. Wilayah pesisir pantai Desa Lembar kerap kali mengalami abrasi terutama di bagian pantai utara yang berbatasan dengan pantai desa Taman Ayu . Abrasi yang terjadi dikarenakan hempasan gelombang yang cukup besar pada waktu – waktu tertentu akibat penambangan pasir secara ilegal serta gundulnya tanaman pantai. Abrasi yang terjadi di wilayah pesisir Desa Lembar khususnya di bagian pantai utara desa Lembar adalah merupakan dampak secara tidak langsung dari keberadaan bangunan PLTU beserta dermaga yang ada di desa Taman Ayu. Di samping itu, juga disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir laut dan muara sungai

secara tidak terkendali. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama berbagai pihak baik pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi dan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pengendalian abrasi pantai dan sempadan sungai.

### **3. Pencemaran Lingkungan Pantai Akibat Sampah Kiriman dan Penambangan pasir.**

Desa Lembar merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat yang memiliki Daerah aliran sungai yang besar dan bermuara di sepanjang pantai. Hal ini akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek lingkungan, social ekonomi dan budaya masyarakat pesisir desa lembar, salah satu dampak yang sangat signifikan adalah banyaknya sampah kiriman yang terakumulasi di wilayah muara sungai serta adanya aktivitas penambangan pasir yang sangat meresahkan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam penanganan dan pengendalian sampah dan penambangan galian C (pasir).

### **4. Potensi dan Daya Tarik Wisata Pesisir Belum Di Kembangkan Secara Optimal**

Wilayah pesisir dan laut Desa Lembar merupakan wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar dalam pengelolaan dan pengembangan wisata pantai dan muara, namun potensi sumberdaya alam yang dimiliki belum didukung oleh fasilitas atau infrastruktur wisata misalnya akses jalan. Pengelolaan dan pengembangan wisata pantai dan muara bukan hanya didukung oleh potensi sumberdaya alam namun membutuhkan banyak pihak yang terlibat dalam memperhatikan dan mendukung pengembangan potensi wisata tersebut misalnya pihak pemerintah dan swasta memfasilitasi masyarakat dalam pengembangan potensi wisata.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pantai merupakan model pengelolaan yang bersifat partisipatif yang menjadikan masyarakat berperan lebih dominan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sehingga masyarakat sendirilah yang merasakan dampak ekonomi dari kegiatan tersebut, Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki dan lebih berperan aktif dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut secara berkelanjutan.

### **5. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir**

Masyarakat pesisir Desa Lembar terdiri dari tingkat pendidikan yang beragam dengan tingkat ekonomi yang rendah. Masyarakat yang memiliki social ekonomi dan social budaya yang rendah identik dengan masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran dan partisipasi yang rendah pula. Sehingga kondisi ini turut berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakan yang bersifat pemenuhan ekonomi jangka pendek dan menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan serta rendahnya tingkat keadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembanguna di kawasan pesisir dan laut.

### **6. Lemahnya Ekonomi Masyarakat Pesisir**

Masyarakat pesisir Desa Lembar merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besar memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah hal ini disebabkan oleh salah satunya adalah masih rendahnya produk olahan hasil perikanan. Rendahnya produk olahan hasil perikanan disebabkan oleh faktor sumberdaya manusia yang masih rendah, akses permodalan yang terbatas serta akses distribusi olahan yang masih bersifat lokal. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pemberdayaan masyarakat pengolah sumberdaya yang mampu meningkatkan diversifikasi produk olahan hasil perikanan misalnya melalui peningkatan kapasitas kelompok pengolah dan membantu memfasilitasi akses permodalan kelompok.

### **7. Belum Adanya Pengaturan Alur Pelayaran Dan Batas Tangkapan**

Banyak konflik yang terjadi selama ini di wilayah pesisir sebagai akibat belum jelasnya penataan dan pengaturan ruang pesisir dan laut misalnya batas alur pelayaran dan zona tangkapan dan lain-lain. Beberapa contoh kasus yang terjadi seperti pemanfaatan zona tangkapan yang banyak dimanfaatkan sebagai jalur transportasi laut baik dari Pelindo maupun armada lainnya sehingga menyebabkan daerah ini terjadi tumpang tindih pemanfaatan zona. Selain itu daerah ini juga dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk kegiatan perikanan (tangkap dan budidaya), akibatnya dapat menyebabkan konflik kepentingan.

Berdasarkan uraian isu wilayah tersebut maka dibuatkan matriks perencanaan wilayah pesisir Desa Lembar Kabupaten Lombok Barat sebagaimana pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Matrik Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Isu	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu					Indikator	Target	Sumber Dana	Pelaksana
				1	2	3	4	5				
Degradasi Ekosistem mangrove akibat konversi lahan menjadi tambak dan pemukiman	- Penataan wilayah pesisir secara terintegrasi berbasis daya dukung kawasan	- Pemulihan ( <i>Restorasi</i> ) ekosistem pesisir - Peningkatan Kapasitas SDM - Inisiasi Penyusunan Regulasi pengelolaan kawasan pesisir - Optimalisasi pengelolaan kawasan pesisir melalui pemanfaatan dana CSR	- Penanaman vegetasi pantai lainnya	√	√	√	√	√	- Meningkatkan tutupan vegetasi pantai	- Tahun 2026	APBN/A PBD/DK P/ dan Pihak Swasta lain	Pemerintah/Swasta/ NGO/PT/dan Stakeholder lainnya
			- Pembuatan Kelompok Pengelola Sumberdaya						- Terpeliharaan vegetasi pantai secara berkesinambungan	- Tidak terjadi konversi lahan tahun 2030		
Abrasi Pantai dan Sungai	- Mensinergikan rencana pembangunan dengan daya dukung kawasan - Optimalisasi peran sosial masyarakat Lembar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.	- <i>Fasilitasi pembangunan media penanggulangan abrasi.</i> - <i>Mengembalikan Fungsi ekologi lingkungan dan rekayasa bangunan pantai yang ramah lingkungan.</i>	- Pembuatan bangunan pemecah gelombang.	√	√	√	√	√	- Tertanggungnya abrasi pantai dan Sungai	- Tahun 2025	APBD/A PBN	Kab/Prov, PU, DKP Lobar dan Klp PSDA serta Pemerintah desa Lembar Kecamatan Lembar
			- Menggalakkan kegiatan Rehabilitasi Vegetasi Pantai. - Pemasangan papan peringatan di lokasi rawan abrasi.						- Terkoordinasinya penanggulangan abrasi antar sektor dan wilayah dengan melibatkan peran serta masyarakat desa dan Pokmas PSDA Desa Lembar Kecamatan Lembar.	- Tahun 2025 - 2028		

Isu	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu	Indikator	Target	Sumber Dana	Pelaksana
Pencemaran Lingkungan Pantai Akibat Sampah Kiriman Dan Penambangan Pasir	- Pengendalian pengendalian bahan pencemaran C di sekitar muara sungai. - Penataan dan penggunaan kawasan berbasis potensi dan peluang keberlanjutan usaha masyarakat pesisir	- Penanggulangan dan pengendalian Pencemaran lingkungan pantai secara partisipatif dan lintas sektoral - Pemanfaatan kawasan berbasis Tata Ruang Wilayah pesisir	- Penyuluhan tentang kesadaran lingkungan - Pengadaan sarana prasarana penanganan sampah berdasarkan kategori limbah organik dan anorganik - Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan Sampah - Pelibatan multisektoral dalam penanganan masalah sampah kiriman. - Pembuatan Peraturan Desa terkait Penambangan Galian C	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	- Terciptanya masyarakat yang sadar lingkungan - Tersedianya sarana dan prasarana penanganan sampah berbasis desa - Terbentuknya masyarakat pesisir yang terampil dalam mengolah sampah - Terjalinya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan sampah kiriman - Berkurangnya tingkat pencemaran perairan baik secara fisik, kimia dan biologi. - Tersusunnya regulasi berupa PERDES terkait dengan penambahan galian C	- Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan meningkat - Tahun 2024 kapasitas masyarakat dalam mengolah sampah mencapai 60% - Terlaksananya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan sampah kiriman minimal setiap enam bulan sekali - Tahun 2024 wilayah pesisir terbebas dari pencemaran - Tahun 2024 ditetapkan regulasi berupa PERDES terkait dengan penambahan galian C	APBD/A PBN /ADD	Pemerintah/Swasta/NGO/PT/dan Stakeholder lainnya
Potensi dan daya tarik wisata pesisir belum di kembangkan secara optimal	Explorasi potensi daya tarik wisata wilayah pesisir	- Inventarisasi potensi sumberdaya pesisir untuk pengembangan pariwisata - Fasilitasi pengembangan potensi dan daya tarik wisata	- Pemetaan Potensi dan daya tarik wisata wilayah pesisir desa - Promosi wisata melalui penyebaran brosur - Pengadaan Sarana dan Prasarana Wisata - Penyuluhan dan pelatihan pariwisata Terpadu - Kerjasama dengan berbagai pihak pengelola wisata	√ √ √ √ √ √ √ √ √	- Tersedianya peta potensi dan daya tarik wisata - Meningkatkan angka kunjungan wisata baik local, nusantara maupun mancanegara - Meningkatkan apresiasi masyarakat dan pemerintah terhadap keunggulan budaya dan daya tarik objek wisata. - Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan	- Tahun 2024 tersedianya peta potensi wisata desa - Lembar kunjungan wisata baik local, nusantara maupun mancanegara - Tahun 2024 daya dukung kegiatan wisata terpenuhi - Tahun 2024 kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan sector	APBD/A PBN dan ADD	Pemerintah/Swasta/NGO/PT/dan Stakeholder lainnya

Isu	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu	Indikator	Target	Sumber Dana	Pelaksanaan
Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir	Menyebarkan konsep Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan wilayah pesisir	- Pendidikan, penyuluhan, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pesisir. - Memperkuat lembaga adat serta hak ulayat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut	√ √ √ √	- Berkurangnya konflik sosial di wilayah pesisir dan laut - Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar sektor baik pemerintah maupun swasta. - Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. - Meningkatkan peran adat istiadat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut	- Mulai tahun 2024 tidak terjadi konflik sosial di wilayah pesisir dan laut - Terjalinya kerjasama dan koordinasi antar sektor baik pemerintah dan koordinasi antar sector baik masyarakat, swasta dan pemerintah - Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir meningkat 75% di tahun 2025 - Tahun 2025 peran adat dan istiadat dalam pengelolaan mencapai 75%	APBD/A PBN	Pemerintah, Desa dan Klp PSDA.
Lemahnya ekonomi masyarakat pesisir	- Mengintensifkan kegiatan pembinaan usaha produksi perikanan yg kompetitif - Peningkatan promosi dan diversifikasi produk perikanan - Peningk	- Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat Nelayan Desa Lembar - Pelatihan tenaga teknis pengembangan diversifikasi produk perikanan - Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) unit pengolahan hasil	- Pelatihan pengembangan usaha produksi perikanan berorientasi pasar. - Pelatihan pengolahan aneka produk perikanan peningkatan mutu produk olahan perikanan. - Pelatihan manajemen administrasi dan kelembagaan.	√ √ √ √ √ √ √ √ √	- Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir - Tumbuhnya kegiatan diversifikasi usaha perikanan	- Tahun 2024 terjadi perbaikan pendapatan (income perkapita naik 5 % dari PDRB) - Tahun 2024 potensi usaha pengolahan berkembang menjadi salah satu produk unggulan perikanan	APBD Prov. NTB  P2HP Prov. NTB  APBN KPDT  BPOM NTB	DKP Lobar dan Prov. NTB  Perindag Lobar dan Prov NTB DKP Lobar dan KPDT  BPOM NTB Dan DKP Lobar. Bakorluh NTB dan Bapeluh Lobar.

atan perikanan.  
sumber - Menjalin  
daya kerjasama  
manusi dengan  
a dalam instansi  
pemanf terkait  
ataan - Pelatihan  
sumber manajemen  
daya usaha  
pesisir perikanan  
skala  
rumah  
tangga

Isu	Strategi	Program	Kegiatan	Waktu	Indikator	Target	Sumber Dana	Pelaksanaan
Belum adanya Pengaturan Alur Pelayaran dan Batas Tangkapan	Menata dan menertibkan pemanfaatan ruang laut berdasar Tata Ruang Wilayah pesisir dan laut secara terpadu	Penataan dan Penertiban Pemanfaatan Zona Laut secara terpadu	- Sosialisasi zona pemanfaatan ruang laut secara terpadu - optimalisasi peran desa dalam pengawasan dan penertiban pemanfaatan zona laut sesuai dengan tata ruang wilayah pesisir dan laut secara terpadu - Pembuatan Perdes tentang batas alur pelayaran dan zona tangkapan	√ √ √ √ √ √	- Tidak Terjadi konflik kepentingan pemanfaatan ruang laut - Pengawasan dan penertiban pemanfaatan zona berbasis desa - Terbentuknya sistem peraturan pemanfaatan ruang laut ditingkat desa - Terbangunnya kesadaran masyarakat desa dan stakeholder lainnya dalam penggunaan ruang laut	- Mulai tahun 2024 tidak terjadi konflik pemanfaatan zona laut - Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penertiban pemanfaatan zona laut mencapai 75% di tahun 2025 - Tahun 2024 ditetapkan regulasi berupa PERDES pengaturan alur pelayaran dengan zona tangkapan	APBN, APBD Prov/Kab/ADD	DKP, Dinas Perhubungan, PELINDO, Desa

### SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan ini menghasilkan: 1) peta infrastruktur *social public* lainnya; 2) Peta *Land Use*; 3) Peta *sea use*; serta 4) rencana induk pengelolaan di wilayah pesisir Desa Lembar yang berisi tentang isu dan strategi pengembangan wilayah pesisir dan laut. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman aksi pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara terintegrasi dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kelestarian lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah setempat bersama pihak-pihak terkait lainnya harus menindaklanjuti rencana pengelolaan wilayah pesisir berbasis potensi kawasan sehingga pengembangannya dapat dilakukan secara berkelanjutan secara multidimensi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pemberdayaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak

terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya atas partisipasi banyak pihak baik moril maupun materil, terutama kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) atas dana internal yang telah diberikan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Burhanuddin, A.I. (2011). *The Sleeping Giant: Potensi dan Permasalahan Kelautan*. Brillian International, Surabaya.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat (DKP Lobar). 2016. *Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)*.
- Harahab, N. (2010). *Penilaian ekonomi ekosistem hutan mangrove & aplikasinya dalam perencanaan wilayah pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hakim, L., Siswanto, D., and Nakagoshi, N. (2017). *Mangrove Conservation in East Java: The Ecotourism Development Perspectives*. *J. Trop. Life. Science* 7 (3),

- 277 – 285.
- Pattimahu, D. V., Kusmana, C., Harjomidjojo, H., & Darusman, D. (2010). Analisis nilai keberlanjutan pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku. *Forum Pascasarjana*, 33(4), 239–249
- Santoso, N. J. B. I. P. B. (2012). Arah kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan mangrove berkelanjutan di Muara Angke Daerah Khusus Ibukota Jakarta.[Disertasi].
- Santoso, N. N. (2018). Status Keberlanjutan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Wilayah Pesisir Desa Akuni Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan (Sustainability management status of mangrove ecosystem in coastal area of Akuni Village District of Tinanggea, South Konawe). *Silvikultur Tropika-Journal of Tropical Silviculture Science and Technology*, 9(1), 44–52
- Sawairnathan, M.I., and Halimoon, N. (2017). Assessment of the local communities' knowledge on mangrove ecology. *Int. J. Hum. Capital Urban manage*, 2(2): 125-138.
- Schaduw, J. N. W. (2015). Keberlanjutan pengelolaan ekosistem mangrove Pulau Mantehage, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang Sains dan Teknologi*, 2(2), 60–70.
- Sukuryadi, Harahab, N., Primyastanto, M., & Semedi, B. (2021). Collaborative-based mangrove ecosystem management model for the development of marine ecotourism in Lembar Bay, Lombok, Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*, 23(5), 6838–6868. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00895-8>
- Sukuryadi dan Ibrahim. (2019). Analisis Kesesuaian Lahan Mangrove Di Wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Lombok Timur Dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan*. 7(1). pp. 11-17
- Sukuryadi, Johari, H. I., Primyastanto, M., Semedi, B., & Science, M. (2021). Institutional capacity in the mangrove ecotourism development of lembar area, west lombok, indonesia. *ECSOFiM: Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine*. 2021. 08(02): 151-165
- Sukuryadi, Harahab, N., Primyastanto, M., dan Mas'ad. (2021). Dampak Pengembangan Ekowisata Mangrove Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Pesisir Desa Lembar Lombok Barat. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan*. 9(2). pp. 126-136
- Tuwo A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Brillian Internasional, Sidoarjo.
- Wardhani, D.P.J., Bambang, S., dan Boedi, H. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Alam Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. *DIPONEGORO Journal Of Maquares Management Of Aquatic Resources*. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016, Halaman 91-100.